



KLIPING

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sumber Berita: **RADAR TARAKAN**

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
											v																			

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES

TAHUN

2016

HALAMAN

B3

Komitmen Perbaiki Pengelolaan Keuangan

TARAKAN-Bupati Kabupaten Tanah Tidung (KTT) DR H Undunyah MH MSi saat penyerahan laporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015, Senin (12/4) di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara kemarin, berkomitmen untuk menjalankan keuangan Pemkab KTT lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Dirinya juga berkomitmen akan melakukan penataan dan peningkatan pejabat-pejabat terkait serta memerangi tindakan-tindakan yang merugikan negara seperti tindak pidana korupsi di dalam pemerintahannya.

"Pemerintah akan terus melakukan perbaikan, penataan dan peningkatan SDM para pejabat agar sesuai dengan bidangnya. Serta berkomitmen memerangi korupsi di dalam pemerintahan," tegasnya.

H Undunyah mengatakan, laporan keuangan 2016 nanti, harus lebih baik dari laporan keuangan 2015. Dia juga berpesan agar seluruh stakeholder terkait penggunaan anggaran daerah untuk bisa berkerja sama dengan BPK setiap kali BPK melakukan pemeriksaan di KTT. Tidak hanya itu, Pemkab KTT akan menyediakan fasilitas dan menjamin keamanan tim BPK yang akan datang berkunjung.

"Setiap kali BPK turun ke KTT, saya harap jangan ada SKPD yang meninggalkan tempat. Semua harus ada di tempat," ujar H Undunyah.

"Fasilitas dan *security* (kemanan, *Red.*) akan kami jamin," janjinya.

Diakukannya, Peraturan Daerah (Perda) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2016 belum mendapatkan tanda tangan dari Pj Bupati, Sanusi. Sehingga berdampak kepada pemberian sanksi berupa pengurangan dana APBD sebanyak 35 persen semenjak Januari lalu.

"Penggunaan dana tersebut bila dilihat dari sisi hukum merupakan

suatu pelanggaran, namun dari sisi pemanfaatan tetap akan kami gunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat KTT," kata dia.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan tahun 2016 ini, bupati dua periode di KTT ini berharap semua sudah dapat berjalan hingga bulan Oktober tahun ini. Sehingga, bulan November pembahasan anggaran perubahan sudah bisa dilaksanakan, dilanjutkan dengan penyusunan APBD tahun 2017.

"Bulan Januari 2017, kita harapkan kegiatan-kegiatan sudah dimulai. supaya di triwulan kedua kita bisa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan," jelasnya.

Dalam pelaksanaan sistem keuangan dengan azas transparansi dan bersih untuk menghindari terjadinya benturan-benturan dengan hukum. Bupati juga berpesan, agar dalam pelaksanaan kegiatan, agar DPRD dapat berkerja sama dengan baik bersama dengan eksekutif. "Perlu ada sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif," imbuhnya.

Transparansi pemerintahan tentu saja sangat diperlukan untuk mewujudkan *Good Governance* (pemerintahan yang baik, *Red.*), hasil pemeriksaan oleh BPK diharapkan disampaikan kepada media agar masyarakat mengetahui. Dirinya khawatir, penyebaran informasi palsu yang dimanfaatkan beberapa pihak untuk menjatuhkan citra pemerintah, BPK sendiri memberikan waktu selama 60 hari bila ditemukan keganjilan data.

"Saya berharap pejabat-pejabat terkait tidak serta merta mengeluarkan informasi yang belum sempurna kepada pihak yang tidak berkepentingan, masih terdapat jangka waktu selama 60 hari untuk melakukan perbaikan," pungkasnya.

Berdasarkan laporan BPK pada tahun lalu, nilai tindak lanjut penyelesaian hasil BPK KTT terdapat di se-



SERAHKAN LAPORAN: Bupati KTT H. Undunyah menandatangani berita acara laporan keuangan Pemkab tahun anggaran 2015 ke BPK perwakilan Kalimantan Utara di Tarakan kemarin.

kitaran 40 persen. Hal tersebut masih sangat rendah bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang terdapat di Kalimantan Utara, sudah mencapai angka 80 persen. Dilandasi hal tersebut, Pemkab KTT pada tahun ini menargetkan tindak lanjut penyelesaian mencapai 80 persen.

Kepala Sub Auditoriat BPK Perwakilan Kaltara, Ramzuhri mengatakan, pada tahun lalu tindak lanjut tersebut masih dapat terblang wajar dikarenakan masih banyak aset daerah KTT yang belum terdata serta lahan yang belum memiliki pemilik. Namun untuk tahun ini, dirinya berharap lebih

baik dari tahun sebelumnya.

"Kami berharap untuk tahun ini, Pemkab KTT lebih baik dari tahun kemarin, sebelumnya kami juga telah memberikan masukan kepada Pemkab untuk melakukan inventarisasi aset kepemilikan," imbuhnya. Disela-sela agenda penyerahan

laporan ke BPK, H Undun juga menyempatkan diri melakukan parat konsolidasi dengan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) KTT di Restoran Hotel Monaco. Rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk membahas tentang rencana kerja Pemkab tahun ini. (**abg*/aln/aan**)